

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas atau tindak kejahatan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang atau kelompok. Kejahatan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan tersebut. Tindak kejahatan seperti hal yang sudah biasa di masyarakat, ketika seseorang tidak perlu lagi berpikir panjang untuk melakukan tindak kejahatan dan para pelaku tidak lagi memikirkan konsekuensi yang terjadi dari perbuatannya tersebut, sehingga para pelaku juga tak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh para korbannya.

Sepertinya kriminalitas tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia apalagi di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan kurangnya penegakan hukum yang ada di Indonesia membuat para pelaku kriminalitas dengan mudah menjalankan aksinya karena kriminalitas dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan dan dimana saja. Banyak kasus kriminalitas yang menjadi sorotan publik pada saat sekarang ini. Berbagai kasus kriminalitas pun dilakukan mulai dari perampokan, pencurian, pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan serta segala perilaku yang mengandung unsur pemaksaan atau kekerasan terhadap fisik pada korbannya.

Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, biasanya para pelaku tindak kejahatan adalah mereka yang berpenghasilan rendah, berstatus sebagai seorang pengangguran, miskin, adanya ketimpangan pendapatan, dan rendahnya IPM masyarakat suatu daerah. Kebutuhan dasar sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan tidak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang terbilang pas-pasan atau tidak

mencukupi. Sedangkan kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat, dan jumlah tanggungan keluarga yang tidak sedikit. Dengan kondisi seperti ini memaksa mereka untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dimana keterampilan dan pendidikan yang mereka miliki sangat rendah. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk mendapatkan penghasilan tambahan yaitu dengan melakukan tindak kejahatan seperti melakukan pencurian, perampokan, penipuan yang dapat merugikan harta benda atau hilangnya nyawa seseorang.

Simandjuntak (1981) menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kriminalitas, diantaranya dilihat dari pendekatan faktor demografik (peningkatan Ketimpangan Pendapatan), faktor ekologi (persebaran lahan pemukiman), faktor geografik (suhu udara, kelembaban, perubahan iklim), faktor ekonomi (kemiskinan dan pengangguran) dan faktor sosial (pendidikan, politik, dan agama), termasuk dalam itu semua adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita (Dermawanti et al., 2015, p. 247).

Faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas salah satunya adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM menunjukkan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan mengingat IPM terdiri dari 3 dimensi utama yakni Kesehatan, Pendidikan, dan Pendapatan. (Febriani, 2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kriminalitas. Usaha meningkatkan nilai IPM adalah salah satu strategi yang dapat dijalankan untuk mengurangi angka kriminalitas. Peningkatan IPM mengindikasikan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik terlihat dari pekerjaan yang baik juga. Pekerjaan yang baik memunculkan pendapatan yang tinggi. Dampak selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan dan turunnya angka kriminalitas.

Selanjutnya, indikator yang dapat mempengaruhi kriminalitas adalah Ketimpangan Pendapatan, Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro & Smith, 2011, p. 254).

Ketimpangan pendapatan menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan skill juga menjadikan seseorang hanya memiliki pendapatan yang rendah dan tidak dapat memiliki pendapatan yang tinggi. Kebutuhan yang semakin tinggi dan pendapatan yang kurang membuat seseorang menjadi gelap mata dan melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

(Edwart & Azhar, 2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Artinya, apabila ketimpangan pendapatan di suatu daerah meningkat maka jumlah kriminalitas juga mengalami peningkatan. Terdapatnya pengaruh positif ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia dikarenakan faktor ekonomi yang merupakan faktor yang sangat klasik dan alasan utama seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Seperti di kota besar tingkat ketimpangan pendapatannya sangat tinggi karena sebagian besar masyarakat yang datang kesana tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup sehingga baik sehingga banyak pendatang yang tidak bekerja dengan cukup layak dan hanya menambah kepadatan daerah itu sendiri. Sedangkan biaya hidup di perkotaan sangat tinggi dan kebutuhan sehari-hari juga harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup sehingga kemiskinan sangat jelas terlihat di daerah Ibu kota, hal inilah yang mendorong orang-orang yang tidak memiliki keahlian untuk melamar pekerjaan yang lebih baik datang ke Ibu kota tanpa berpikir panjang mereka menjadi pelaku kriminalitas.

Tabel 1.1
Data Indeks Pembangunan Manusia ,Ketimpangan Pendapatan dan Tindakan
Kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (X1) (Persen)	Rasio Gini (X2) (Persen)	Tindak Pidana (Y) (Jumlah Kasus)
3	2020	70,01	0,34	6.216
4	2021	70,24	0,34	7.370
5	2022	70,90	0,34	9.111

(Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2023)

Secara teori, hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kriminalitas adalah negatif (berlawanan arah), sesuai hasil penelitian (Febriani, 2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kriminalitas. Usaha meningkatkan nilai IPM adalah salah satu strategi yang dapat dijalankan untuk mengurangi angka kriminalitas. Peningkatan IPM mengindikasikan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik terlihat dari pekerjaan yang baik juga. Pekerjaan yang baik memunculkan pendapatan yang tinggi. Dampak selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan dan turunnya angka kriminalitas. Berdasarkan data pada Tabel 1 ditemukan fenomena tidak sesuai dengan teoritis, yaitu dimana ketika IPM turun sebesar 70,01% di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya (2019), namun tingkat kriminalitas turun di tahun 2020 tersebut sebanyak 6.216 kasus.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan laporan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel, pada tahun 2020 kualitas pembangunan manusia berdasarkan IPM di Sumatera Selatan memang masih dibawah kualitas pembangunan manusia secara nasional dimana IPM Indonesia sudah mencapai 71,94 sedangkan Sumatera Selatan berada pada angka 70,01.

Untuk di wilayah Sumbagsel, IPM Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu yang terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup manusia di Sumatera Selatan dilihat dari angka harapan hidup, pendidikan, dan kelayakan hidup relatif masih tertinggal

dibandingkan daerah sekitar. Dari monitoring terhadap perkembangan Indeks IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tercatat bahwa terdapat 4 kabupaten/ kota yang teratas tingkat IPM nya selama kurun waktu 2015 - 2020, yaitu Kota Palembang (IPM 78,33), Kota Lubuk Linggau (IPM 74,78), Kota Prabumulih (IPM 74,55), dan Kabupaten OKU (IPM 69,32) seperti terlihat pada grafik 2.6. Hal ini menunjukkan akses yang lebih mudah terhadap berbagai fasilitas yang ada di perkotaan, seperti pendidikan dan kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia yang lebih baik jika dibandingkan daerah pedesaan yang banyak tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Progres perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota tahun 2015-2020 di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan secara agregat sebesar -0,06%.

Fenomena berikutnya pada saat IPM meningkat di tahun 2021 sebesar 70,24% diiringi juga dengan peningkatan kriminalitas sebanyak 7.370 kasus. Menurut BPS Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,09 persen dibanding tahun 2020. Dari sisi pendidikan, pada tahun 2021 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,54 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I.

Angka ini meningkat 0,09 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,45 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,06 tahun, dari 8,24 tahun menjadi 8,30 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,98 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

BPS Sumatera Selatan menyajikan perkembangan indikator utama keamanan selama tahun 2018-2020. Selama kurun waktu tersebut, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan menurun. Laporan yang dihimpun dari Kepolisian Resort (Polres) masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan

(crime total) pada tahun 2018 sebanyak 12.994 kasus, menurun menjadi 11.618 kasus pada tahun 2019, dan menurun lagi menjadi 6.216 kasus pada tahun 2020.

Hubungan antara Ketimpangan pendapatan dengan Kriminalitas secara teori adalah positif (searah). Menurut (Becker & Landes, 1974) Peningkatan pendapatan relatif kelompok kaya dibandingkan yang miskin akan menyebabkan distribusi pendapatan lebih tidak merata dan akan meningkatkan tingkat kriminal. Secara implisit, teori ini juga menyatakan bahwa area dengan proporsi kemiskinan (penduduk miskin) dan ketimpangan pendapatan yang besar merupakan area komunitas asal kriminal.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 ditemukan adanya fenomena tidak sesuai dengan teoritis, yaitu dimana ketika ketimpangan pendapatan (gini ratio) naik sebesar 0,34% di tahun 2020 namun tingkat kriminalitas turun di tahun 2020 tersebut sebanyak 6.216 kasus. Kemudian dimana nilai rasio gini tidak mengalami perubahan (tetap) dari tahun 2020 hingga 2021, namun jumlah kasus kriminalitas terus meningkat 3 tahun berturut-turut tersebut.

Peneliti Institute *For Development of Economics and Finance* Sugiyono Madelan Ibrahim (katadata.co.id) memperkirakan Penyebab ketimpangan pendapatan, yakni perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dan rasio gini. Semakin rendah perekonomiannya gini ratio menjadi cenderung lebih tinggi. Faktor lainnya yang mempengaruhi kenaikan rasio gini yakni ekonomi yang belum akan pulih dalam waktu dekat meski program vaksinasi berjalan. Pemulihan ekonomi akan dipengaruhi herd immunity atau kekebalan kelompok yang tercipta dari vaksinasi terhadap 70% penduduk RI.. Pandemi Covid-19 mengakibatkan kesenjangan penduduk antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Badan Pusat Statistik mencatat ketimpangan pengeluaran penduduk RI yang diukur oleh rasio gini (gini ratio).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut bagaimana **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan**

Pendapatan terhadap Kriminalitas Di Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2022”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2020-2022 secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan berpengaruh terhadap tingkat Kriminalitas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial maupun simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dapat mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan terhadap tingkat Kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2020-2022